



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN NOMOR 19 TAHUN 2023

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

NO	NAMA JABATAN	ESELON
1	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	II.a

B. Deskripsi Tugas Jabatan

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data informasi, dan layanan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, pengelolaan, dan layanan hubungan masyarakat;
- b. Koordinasi, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi;
- c. Koordinasi, pengelolaan data, layanan informasi, dan layanan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Persyaratan

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b);
3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal **2 Januari 2024**;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2021 dan tahun 2022);
8. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
9. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik;
12. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
13. Memiliki kompetensi, kepemimpinan, dan integritas yang dibutuhkan;
14. Sehat jasmani dan kejiwaan/rohani;
15. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
16. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun 2022;
17. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia;
18. Mampu bekerja sama dan bersosialisasi dengan tim dengan berbagai macam kultur; dan
19. Memiliki etos kerja dan mampu bekerja di bawah tekanan.

B. Tata Cara Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen Lamaran

1. Pengumuman pendaftaran Seleksi Terbuka ditayangkan melalui tautan: <https://ombudsman.go.id/pengumuman>.
2. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui tautan <https://seleksi.ombudsman.go.id/seleksijpt> (dihimbau agar pelamar melakukan proses pendaftaran menggunakan PC/laptop). Periode pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal **1 s.d. 15 Oktober 2023**.
3. Pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan.
4. Dokumen kelengkapan administrasi yang perlu diunggah (**dalam hasil scan**) sebagai berikut:
 - a. **Asli** Surat Lamaran yang ditujukan ke Ketua Panitia Seleksi yang ditandatangani pelamar di atas materai Rp. 10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, Dokumen **wajib sesuai dengan format dan ketentuan Panitia Seleksi**, format dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - b. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 berwarna (format file *jpeg/jpg*, maksimal 500 KB).
 - c. Daftar Riwayat Hidup yang memuat data pribadi, pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan, nomor HP, alamat email domain *gmail.com* (format file *pdf*, maksimal 500 KB, Dokumen **wajib sesuai dengan format dan ketentuan Panitia Seleksi**, format dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - d. **Asli** Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bermeterai Rp.10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, Dokumen **wajib sesuai dengan format dan ketentuan Panitia Seleksi**, format dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - e. **Asli** Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani pelamar di atas materai Rp. 10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, Dokumen **wajib sesuai dengan format dan ketentuan Panitia Seleksi**, format dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - f. **Asli** Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik yang ditandatangani pelamar di atas materai Rp. 10.000,- (format file *pdf*,

maksimal 500 KB, Dokumen **wajib sesuai dengan format dan ketentuan Panitia Seleksi**, format dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);

- g. **Asli** Pakta Integritas yang ditandatangani pelamar di atas materai Rp. 10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, Dokumen **wajib sesuai dengan format dan ketentuan Panitia Seleksi**, format dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
- h. **Asli** Ijazah pendidikan dengan strata pendidikan tertinggi (D-IV, S-1, S-2 dan/atau S-3 jika ada). Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam 1 (satu) file *pdf*, maksimal 1 MB);
- i. **Asli** Surat Keputusan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir minimal Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b) (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- j. **Asli** Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Fungsional dalam Jabatan Terakhir (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- k. **Asli** sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III) dan/atau Tingkat II (Diklat PIM Tk. II) (format file *pdf*, maksimal 1 MB),
- l. **Asli** sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar (format file *pdf*, maksimal 1 MB);
- m. **Asli** Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2021 dan Tahun 2022 (format file *pdf*, maksimal 1 MB);
- n. **Asli** Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terdiri atas:
 - 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
 - 2) Surat Keterangan Sehat Kejiwaan/Rohani dari Dokter Spesialis (format file *pdf*, maksimal 500 KB); dan
 - 3) Surat Keterangan Bebas Narkoba (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- n. **Asli** Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- o. **Asli** NPWP (format file *pdf*, maksimal 500 KB);

- p. **Asli** Bukti penyerahan SPT Tahun 2022 (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- q. **Asli** Bukti laporan penyerahan LHKASN atau LHKPN Tahun 2022 **yang telah di verifikasi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB).

**Penggunaan 1 (satu) meterai hanya untuk 1 (satu) dokumen, tidak digunakan lebih dari 1 (satu) dokumen.*

5. Dokumen yang diunggah dapat dibaca dan dipahami dengan jelas serta merupakan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut. Dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat dipahami dengan jelas, tidak akan diproses.
6. Batas waktu unggah dokumen kelengkapan administrasi paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 24.00 WIB. Unggah dokumen kelengkapan administrasi yang diterima melewati batas waktu tersebut tidak akan diproses.
7. Proses pendaftaran wajib dilakukan dengan mengisi data diri dan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada angka 4. Pelamar yang tidak mengisi data diri dan/atau tidak mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka dinyatakan tidak mengikuti proses pendaftaran seleksi.
8. Bagi peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2023 yang telah lolos 3 (tiga) terbaik yang diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, wajib menyampaikan dokumen fisiknya kepada Panitia Seleksi. Teknis penyampaian akan disampaikan pada pengumuman terkait.

C. Jadwal Tentatif Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penerimaan lamaran	1 – 15 Oktober 2023
2.	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	18 Oktober 2023
3.	Ujian Makalah	20 Oktober 2023
4.	Pengumuman hasil ujian makalah	1 November 2023
5.	<i>Assessment</i>	15 – 17 November 2023
6.	<i>Pengumuman Hasil Assessment</i>	6 Desember 2023
7.	Penelusuran Rekam Jejak	2 November 2023 – 8 Desember 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU
8.	Seleksi Wawancara dan Presentasi	12 Desember 2023
9.	Pengumuman hasil akhir seleksi	15 Desember 2023

D. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

- a. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- b. Selanjutnya panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.

2. Seleksi Penulisan Makalah

- a. Penyusunan makalah dilaksanakan di depan Panitia Seleksi.
- b. Selanjutnya Sekretariat Panitia Seleksi akan menyampaikan hasil pembuatan makalah kepada Panitia Seleksi dan mengumumkan hasilnya di *website* Ombudsman.
- c. Peserta yang dinyatakan lulus tahapan Penulisan Makalah dan berhak mengikuti tahapan *Assessment Center* adalah peserta dengan nilai tertinggi (dengan catatan paling banyak 6 (enam) kali alokasi formasi jabatan yang dilamar).

3. *Assessment*

- a. Penilaian menggunakan metode *Assessment* (tertulis, diskusi, dan wawancara) dilaksanakan di Lembaga *Assessment* yang akan disampaikan pada pengumuman selanjutnya.
- b. Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus seleksi *Assessment*, untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- c. Peserta yang hasil tahapan *Assessment* adalah "*Tidak lulus*"/"*Tidak Disarankan*"/istilah lain yang sejenis, dinyatakan tidak lulus tahapan *Assessment* dan dinyatakan tidak berhak untuk mengikuti tahapan Seleksi Wawancara dan Presentasi.
- d. Dalam hal jumlah peserta yang lulus tahapan *Assessment* kurang dari 3 (tiga) kali alokasi formasi jabatan, maka penentuan kelulusan kekurangan formasi tersebut dilakukan dengan pemeringkatan nilai tertinggi dari rata – rata nilai tahapan penulisan makalah dan nilai tahapan *Assessment*.

4. Seleksi Wawancara dan Presentasi
 - a. Peserta menyusun paparan dan melaksanakan presentasi paparannya di depan Panitia Seleksi.
 - b. Panitia Seleksi akan melakukan wawancara akhir dan dapat mengundang *user* sesuai jabatan.
5. Penyerahan hasil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Ketua Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Ombudsman Republik Indonesia.

Seluruh hasil pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan langsung kepada peserta yang lulus dengan tahapan seleksi dan/atau melalui *website* Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id/pengumuman.

E. Ketentuan Lain-lain

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. **Pelamar tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran secara berulang atau lebih dari 1 (satu) kali.** Pelamar wajib memastikan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Panitia Seleksi **tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun** kepada peserta selama proses seleksi. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum - oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Panitia Seleksi.
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta.
5. Seluruh dokumen administrasi yang disampaikan menjadi hak milik Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia.
6. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia berhak membatalkan hasil seleksi.

8. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif pelaksanaan tahapan seleksi dapat menghubungi Tim Sekretariat Seleksi ke email seleksijpt@ombudsman.go.id.

Catatan:

Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui *website* Ombudsman RI www.ombudsman.go.id, untuk itu para peserta seleksi agar aktif mengakses *website* dimaksud. Kelalaian karena tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggungjawab peserta.

Jakarta, 29 September 2023
Ketua Panitia Seleksi,

#

Yeka Hendra Fatika